

**MEDIA MONITORING 100 HARI
PEMERINTAHAN JOKOWI-JK**

THE  NDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Latar Belakang

- Terpilihnya pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 memunculkan harapan masyarakat tentang perubahan bagi bangsa ini. Harapan yang kemudian coba dijawab oleh Jokowi-JK melalui pembentukan Kabinet Kerja.
- Kini Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki seratus hari masa kerjanya. Melihat perjalanan seratus hari kerja sebuah pemerintahan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan seratus hari merupakan langkah awal Pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan janji-janji politiknya sekaligus berupaya menghadirkan perubahan bagi masyarakat.
- Selama perjalanan seratus hari pemerintahan Jokowi-JK tidak luput dari perhatian pemberitaan media massa. Penilaian media massa merupakan realitas dari kinerja Pemerintahan Jokowi-JK selama seratus hari masa kerjanya ini. Oleh karena itu untuk melihat kinerja seratus hari Pemerintahan JKW-JK, diperlukan media monitoring pemberitaan surat kabar nasional.

Tujuan

- Media monitoring 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK bertujuan pertama, untuk mengukur kecenderungan nada pemberitaan (tone) selama seratus hari pemerintahan Jokowi-JK.
- Kedua, memetakan dan menganalisis isu-isu yang diangkat oleh media massa selama seratus hari pemerintahan Jokowi-JK. Ketiga, mengukur frekuensi pemberitaan terhadap Menteri-Menteri selama seratus hari pemerintahan Jokowi-JK.

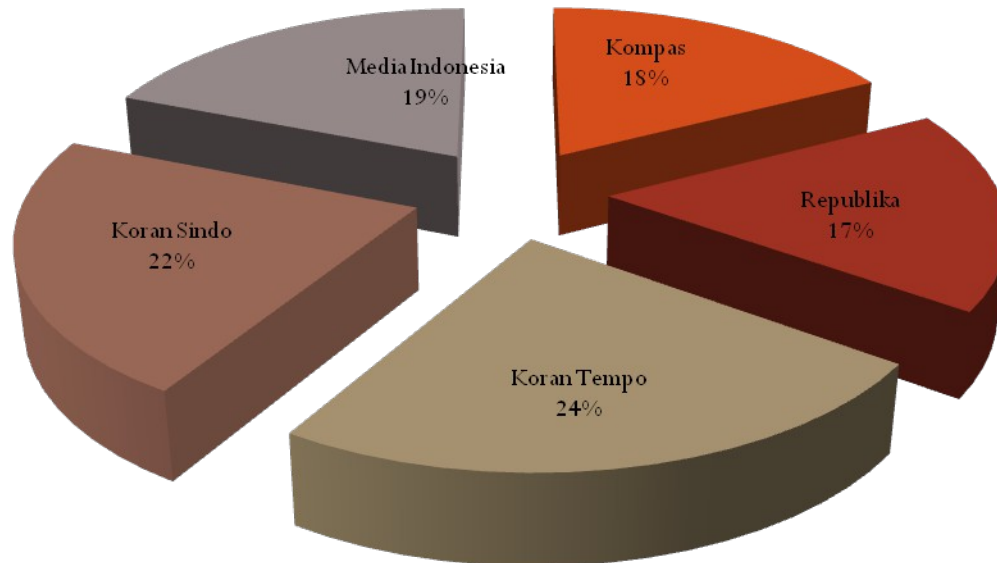
Metodologi

- Penentuan sample pada media monitoring dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling dilakukan untuk memilih sampel atau periode tertentu atas dasar pertimbangan ilmiah.
- Ada dua aspek penting dalam melakukan pemilihan sampel secara purposive: tujuan penelitian dan pemilihan teks ataupun periode secara purposive (Eriyanto, 2011).
- Media monitoring 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK dilakukan terhadap Headline pemberitaan surat kabar nasional.

- Headline merupakan judul berita utama dari sebuah surat kabar. Headline sebuah surat kabar menunjukkan kecenderungan pemberitaan surat kabar. Pembaca akan lebih mengingat headline yang dipakai dari berita (Eriyanto,2002:257). Headline juga merepresentasikan gambaran kepada pembaca tentang peristiwa dinilai positif dan negatif.
- Media monitoring 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK dilakukan terhadap pemberitaan surat kabar nasional. Surat kabar nasional: Kompas, Republika, Media Indonesia, Koran Tempo, Sindo.

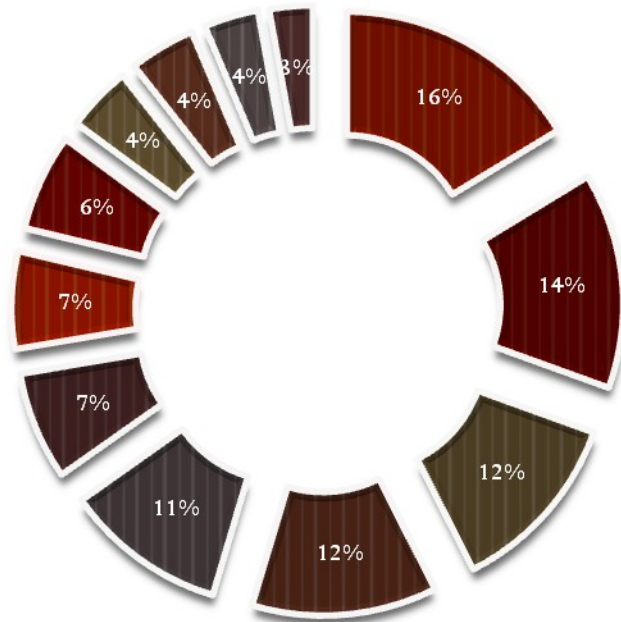
HASIL TEMUAN MEDIA MONITORING

Frekuensi Pemberitaan Surat Kabar



Frekuensi Isu Pemberitaan

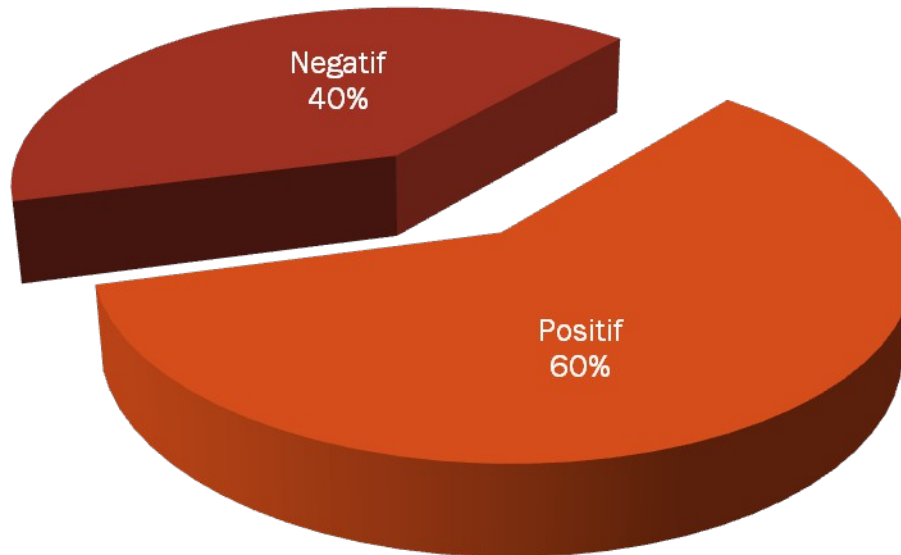
Headline Pemberitaan Media Massa 100 Hari Jokowi-JK



- Kenaikan Harga BBM 16%
- Polemik Pencalonan Kapolri 14%
- Reformasi Tata kelola Migas 12%
- Polemik Industri Penerbangan 12%
- Gejolak nilai tukar rupiah 11%
- Program kompensasi kenaikan BBM 7%
- Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan 7%
- Pertemuan KTT APEC dan ASEAN 6%
- Polemik Pemilihan Jaksa Agung 4%
- Hukuman Mati Kasus Narkoba 4%
- Rekening gendut kepala daerah 4%
- Penundaan Penerapan Kurikulum pendidikan 3%

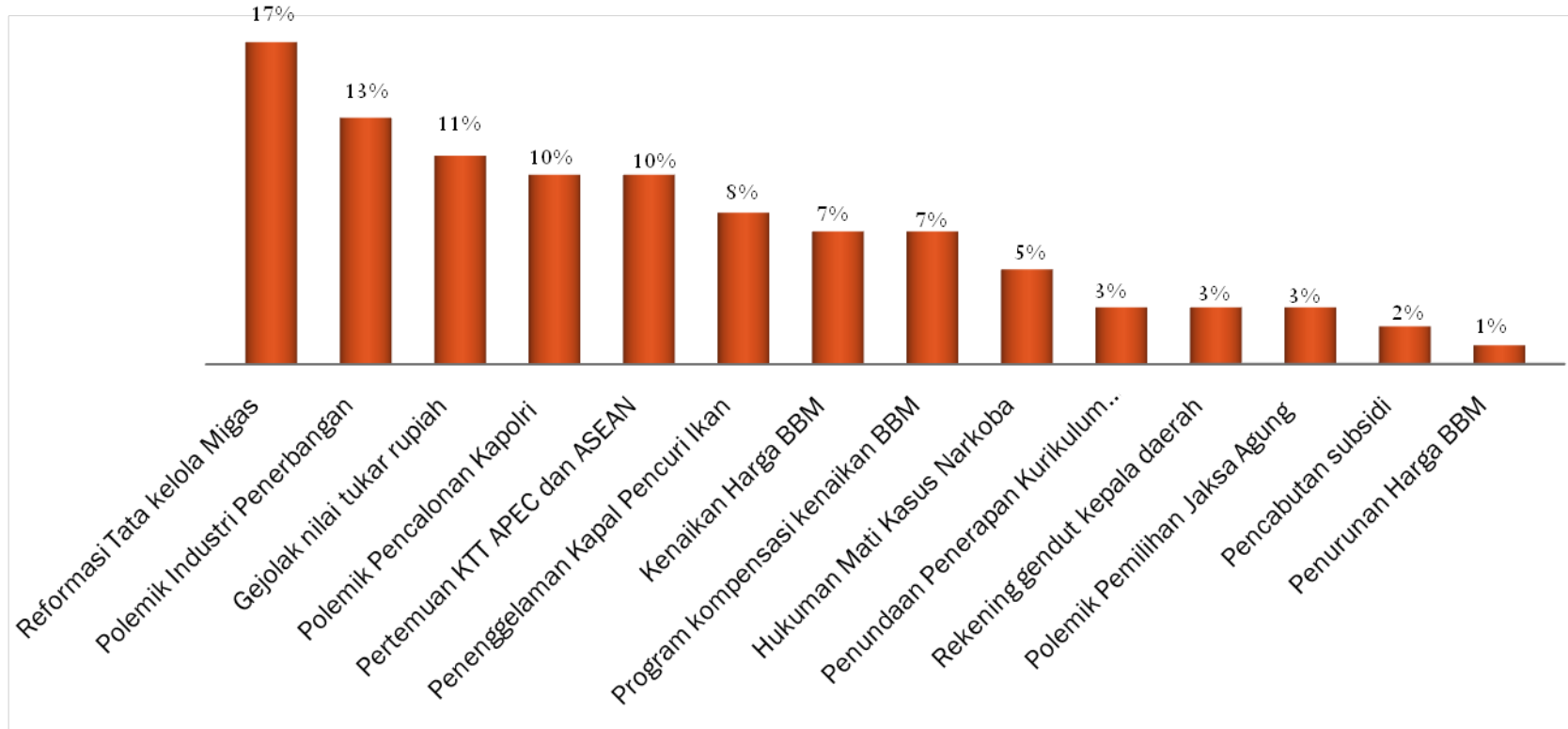
Selama kurun waktu 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sorotan surat kabar terbagi atas 12 isu yang menjadi headline. Isu tentang kenaikan harga BBM menjadi isu yang paling menjadi sorotan dengan 16 persen. Isu polemik pemilihan Kapolri menduduki urutan kedua dengan 14 persen, dan isu reformasi tata kelola migas di urutan ketiga dengan 12 persen.

Nada Pemberitaan Agregatif



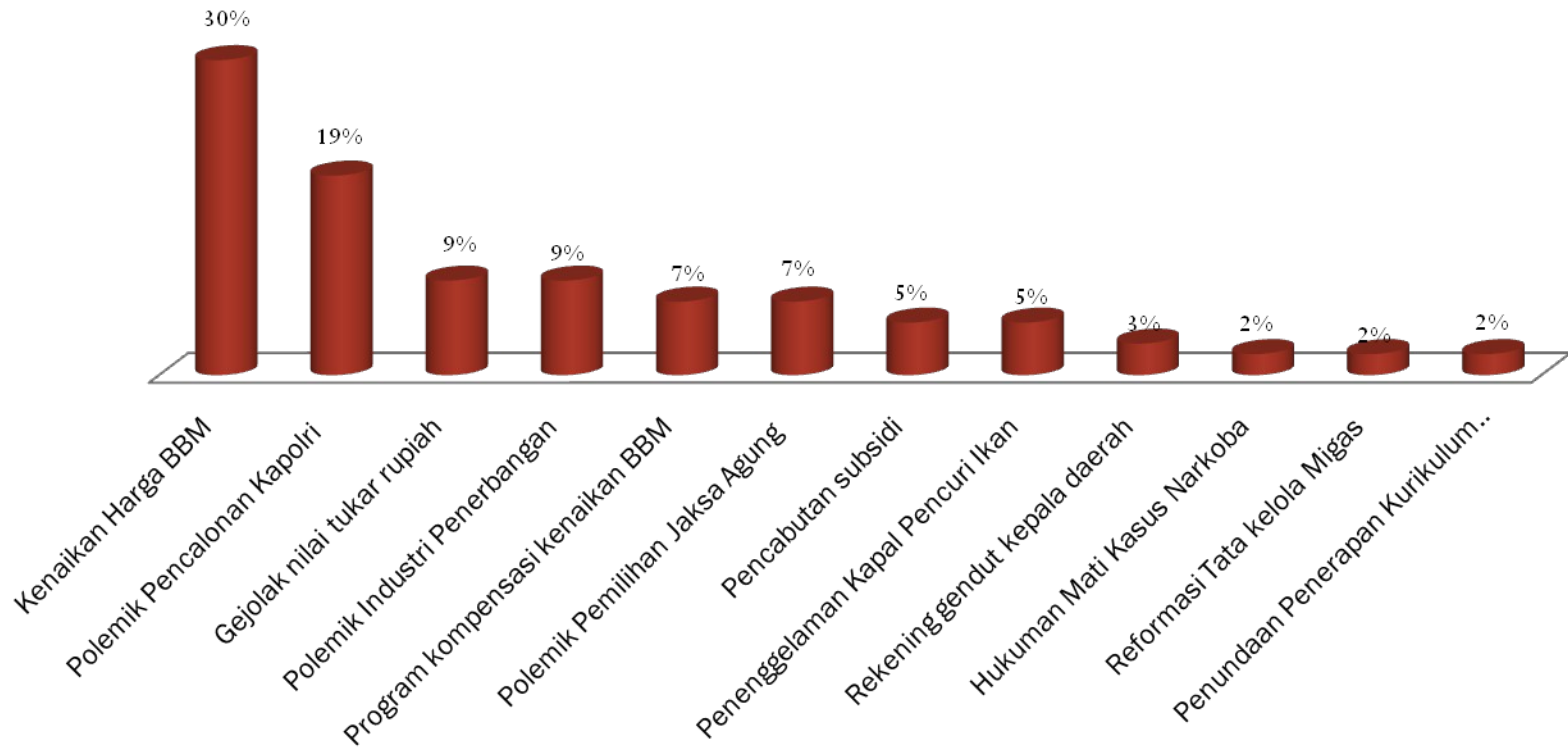
Secara umum nada pemberitaan selama tiga bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK, nada positif sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang negatif terhadap kinerja mereka. Nada positif headline surat kabar sebesar 60 persen dibandingkan negatif yang sekitar 40 persen.

Nada Positif Pemberitaan



Nada positif selama tiga bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK ditujukan pada isu reformasi tata kelola migas yang dilakukan Kementerian ESDM. Isu reformasi tata kelola migas mendapatkan nada positif sebesar 17 persen.

Nada Negatif Pemberitaan



Nada negatif pemberitaan selama tiga bulan pemerintahan Jokowi-JK ditujukan pada isu kenaikan harga BBM. Isu kenaikan harga BBM mendapatkan nada negatif sebesar 30 persen.

Kesimpulan

- Selama kurun waktu 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sorotan surat kabar terbagi atas 12 isu yang menjadi headline. Isu tentang kenaikan harga BBM menjadi isu yang paling menjadi sorotan dengan 16 persen. Isu polemik pemilihan Kapolri menduduki urutan kedua dengan 14 persen, dan isu reformasi tata kelola migas di urutan ketiga dengan 12 persen.
- Secara umum nada pemberitaan selama tiga bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK, nada positif sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang negatif terhadap kinerja mereka. Nada positif headline surat kabar sebesar 60 persen dibandingkan negatif yang sekitar 40 persen.
- Ini menggambarkan bahwa diawal terpilihnya Jokowi sebagai Presiden memunculkan harapan tinggi dari masyarakat. Akan tetapi, setelah pembentukan dan pelantikan kabinet, sedikit demi sedikit harapan tersebut mengalami penurunan di 100 hari masa kerjanya ini. Hal ini ditandai dengan kenaikan BBM di bulan November 2014.

- Nada positif selama tiga bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK ditujukan pada isu reformasi tata kelola migas yang dilakukan Kementerian ESDM. Isu reformasi tata kelola migas mendapatkan nada positif sebesar 17 persen. Kemudian diikuti dengan upaya pembenahan dalam industri penerbangan nasional yang dilakukan Kementerian Perhubungan, setelah jatuhnya pesawat Air Asia. Isu ini mendapatkan 13 persen nada positif.
- Pemberitaan mengenai respon pemerintah menghadapi gejolak nilai tukar rupiah, kegiatan Presiden Jokowi selama mengikuti pertemuan KTT APEC dan ASEAN, serta kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan juga mendapatkan nada yang positif.
- Nada negatif pemberitaan selama tiga bulan pemerintahan Jokowi-JK ditujukan pada isu kenaikan harga BBM. Isu kenaikan harga BBM mendapatkan nada negatif sebesar 30 persen. Diikuti dengan pemberitaan mengenai pemilihan Kapolri yang mendapatkan 19 persen nada negatif.

- Menarik juga disimak dalam isu pemilihan Kapolri, bahwa dalam pemberitaan isu ini terdapat nada positif juga ditujukan pada pemberitaan pemilihan Kapolri yang mendapatkan 10 persen. Nada pemberitaan positif pada isu ini, ditujukan atas pemberitaan yang mendukung KPK dalam mengusut rekening gendut dari Calon Kapolri Budi Gunawan. Di sisi yang lain dalam isu ini pula sorotan surat kabar memberikan 19 persen nada negatif.
- Artinya dalam isu pemilihan Kapolri, surat kabar lebih banyak memberikan nada pemberitaan yang negatif. Nada pemberitaan negatif pada isu ini, ditujukan pada Presiden Jokowi yang dianggap terlalu diintervensi kepentingan koalisi Parpol pengusung dalam menentukan calon kapolri. Presiden Jokowi juga dinilai lamban untuk menengahi konflik antara Polri dan KPK.